

ABSTRAK

Studi ini mengkaji relasi kekuasaan pada saat pemilu legislatif dari sudut pandang relasi gender yang mempengaruhi dan mengatur relasi politik caleg perempuan dan laki-laki, dengan menggunakan teori relasi kekuasaan Michel Foucault. Relasi kekuasaan berada di mana – mana dan tidak terlokalisir dalam sebuah struktur, menjadikan segala hal sebagai sumber kuasa untuk menundukkan relasi dalam wacana yang kemudian mewujud dalam praktik – praktik politik yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam. Subyek penelitian didapatkan dari metode snowball, dimana caleg perempuan sebagai informan subyek, dan informan non subyeknya adalah keluarga, pemilih perempuan dan tim sukses caleg perempuan.

Pemilu legislatif DPRD Surabaya dari tahun 2009 hingga 2014 telah menunjukkan bahwa partai politik memenuhi kuota caleg perempuan sekurang-kurangnya 30%. Namun, tidak semua partai politik mencerminkan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Walaupun kemudian dalam persebaran struktur / jabatan DPRD Kota Surabaya, para anggota DPRD perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinat.

Relasi kekuasaan caleg perempuan dalam upaya pemenangan pemilu legislatif beragam. Relasi kekuasaan caleg perempuan dengan parpol, pengurus parpol, caleg laki-laki saat pendaftaran dan penentuan nomor urut tidak menguntungkan, tetapi dengan tim sukses saling menguntungkan. Relasi kekuasaan saat penentuan dapil dan kampanye politik dengan parpol dan lembaga penyelenggara pemilu tidak menguntungkan, sedangkan saling menguntungkan dengan partai politik, antar caleg perempuan, tim sukses, konstituen. Saat pemungutan suara, relasi kekuasaan dengan saksi tidak menguntungkan dan saling menguntungkan. Sedangkan dengan caleg laki-laki, parpol, dan lembaga penyelenggara pemilu tidak menguntungkan, serta dengan antar caleg perempuan dan tim sukses saling menguntungkan.

Kata kunci : Relasi Kekuasaan, Caleg Perempuan, pemilu legislatif.

ABSTRACT

This study investigates the power relations at the time of legislative elections from the point of view of gender relations that influence and regulate the political relations of women candidates and men, using Michel Foucault's theory of power relations. Power relations are where - where and not localized in a structure, making all things as a source of power to subdue the relations in the discourse which then manifests in practice - political practices. This study used a qualitative approach and in-depth interviews. The subjects of the study was obtained from the snowball method, whereby women candidates as an informant subject, and the subject is a non informant families, women voters and women candidates successful team.

Surabaya Parliament legislative elections from 2009 to 2014 have shown that the political parties meet quotas of women candidates at least 30%. However, not all political parties reflect the representation of women by 30%. Although later in the distribution structure/position Surabaya City Council, council members still placed women in a subordinate position.

Power relations women candidates in legislative elections diverse winning effort. Power relations women candidates to political parties, political party officials, candidates males pennetuan during registration and serial numbers are not profitable, but with a mutual successful team. Power relations when determining electoral district and political campaigns by political parties and election management bodies are not profitable. whereas mutual benefit with political parties, among female candidates, successful team, constituents. When voting, power relations with the witness is not profitable and mutually beneficial. While the male candidates, political parties and election management bodies are not profitable, as well as with women candidates among mutually beneficial and successful team.

Keywords: Power Relations, Women candidates, legislative elections.